

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. Hampir seluruh daerah di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang apabila dikelola dengan baik tentunya akan mensejahterakan rakyatnya. Suatu perencanaan yang baik untuk mampu memanfaatkan semua kekayaan alam secara optimal akan mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang makmur. Perencanaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan.

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, termasuk Indonesia. Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>1</sup> Hal ini berarti, memiliki pekerjaan yang layak dan hidup bebas dari kemiskinan merupakan hak asasi setiap warga negara dan merupakan tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Tujuan pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian

---

<sup>1</sup> Anonim, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Gradien Mediatama, 2011), p.37

mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan.

Pada tahun 2000 beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia menandatangani Deklarasi Milenium yang menunjukkan komitmen bangsa-bangsa tersebut untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*) dimana salah satu pointnya adalah pengentasan kemiskinan dengan indikator keberhasilannya adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas rakyat.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah pengangguran dan kemiskinan untuk diatasi sehingga taraf kehidupan rakyat menjadi lebih berkualitas.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Di tengah upaya pemerintah mencapai target angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,1 persen pada tahun 2009, realita menunjukkan trend TPT cenderung meningkat pada kisaran 8,1 persen hingga 11,2 persen.<sup>3</sup> Pengangguran yang tinggi menyebabkan banyak hal, yaitu terjadinya pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dan dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal.

Pengangguran terjadi karena berbagai faktor. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia umumnya lebih kecil dari jumlah angkatan kerja yang ada.

---

<sup>2</sup>Ari Widiastuti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Jawa Tengah*, Skripsi Universitas Diponegoro, 2010, p.17

<sup>3</sup>Wachyu Winarsih, *Analisis Pengangguran Terdidik Katalog BPS 1701* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006), p. 42

Kondisi ini berjalan bertahun-tahun sehingga terjadi akumulasi pengangguran yang semakin tahun menjadi semakin besar. Situasi ini juga terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan juga karena kelangkaan modal untuk berinvestasi sehingga tidak mampu menyerap pertambahan tenaga kerja. Faktor lain adalah karena kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mengakibatkan tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja juga berkontribusi terhadap terjadinya pengangguran.

Istilah kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai keadaan hidup. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia, baik pada negara berkembang maupun pada negara maju. Masalahnya sama yaitu kemiskinan, namun dimensinya berbeda. Masalah kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang seperti di Indonesia persoalannya menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk.<sup>4</sup>

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari kemiskinan dalam lingkup regional. Pembangunan yang kurang memperhatikan aspek pemerataan akan semakin menciptakan ketimpangan regional yang selanjutnya akan meningkatkan kemiskinan di daerah-daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Maimun Sholeh, "Kemiskinan: Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya", Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, p.1

<sup>5</sup>Catur Pangih Pamungkas, "Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Di Jawa Timur: Suatu Pendekatan Spasial", Jurnal Riset Dan Ekonomi, Desember 2009, p.201

Untuk itu diperlukan kegiatan pembangunan daerah yang lebih optimal khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kota dimata masyarakat merupakan tempat yang menjanjikan dari segi *financial* sehingga kehidupan kota tidak terlepas dengan para migran. Namun, ketika kondisi ekonomi tidak lagi dapat memberikan harapan, masih banyak migran yang berupaya untuk tetap hidup di kota dengan pekerjaan yang tidak layak dan penghasilan yang rendah. Berikut data pengangguran dan kemiskinan di wilayah perkotaan di Indonesia.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Dan Jumlah Pengangguran Terbuka Wilayah**  
**Perkotaan Di Indonesia**  
**Tahun 2011**

<b>Pulau</b>	<b>Jumlah Pengangguran Terbuka</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>
Sumatera	782 507	2 135 770
Jawa	3 312 030	7 518 720
Bali dan Nusa Tenggara	155 034	658 130
Kalimantan	245 153	265 440
Sulawesi	169 911	354 980
Maluku dan Papua	61 576	113 740
<b>Indonesia</b>	<b>4 726 211</b>	<b>11 046 750</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah, 2011*

Data statistik menunjukkan bahwa dari total jumlah pengangguran di wilayah perkotaan Indonesia, pulau Jawa memiliki kontribusi lebih besar atau sekitar 70 persen dibandingkan dengan pulau lainnya. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia. Pulau Jawa memiliki kontribusi yang lebih besar atau sekitar 68 persen dibandingkan dengan pulau lainnya.

Salah satu masalah sosial yang dihadapi berbagai kota besar di Indonesia dewasa ini adalah perkembangan jumlah pendatang liar dan arus urbanisasi berlebih (*over urbanization*) yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Daya dukung dan daya tampung kota tidak lagi mampu mengimbangi penambahan arus para migran yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Ketika jumlah migran melonjak, sementara kesempatan kerja yang tersedia justru semakin langka, dapat dipastikan permasalahan yang muncul akan rumit: pengangguran semakin banyak di kota besar, sektor informal akan berkembang pesat, dan bahkan tidak mustahil pula angka kriminalitas semakin mencemaskan akibat kebutuhan hidup dan persaingan semakin keras di kota besar.

DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi di pulau Jawa, sekaligus menjadi ibukota dari negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2010 sebanyak 9,61 juta jiwa yang meningkat sekitar 390 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.<sup>6</sup> Pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang terpusat di Jakarta menjadi pemicu berpindahannya penduduk dari daerah lain ke wilayah DKI Jakarta. Sektor formal yang terbatas menyebabkan penduduk bekerja pada sektor informal yang penghasilannya tidak mencukupi. Bahkan, penduduk yang tidak memiliki keterampilan tidak mendapat pekerjaan yang mengakibatkan jumlah pengangguran dan penduduk miskin meningkat.

Data BPS tahun 2011 menunjukkan tingkat pengangguran di DKI Jakarta sebesar 10,80 persen atau turun hanya 0,25 persen dari tahun sebelumnya.

---

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik, *Jakarta Dalam Angka Tahun 2011*, p.1

Sedangkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tahun 2011 sebesar 3,75 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen dari tahun sebelumnya.

Pengangguran dan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pengangguran dan kemiskinan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hatta Rajasa memandang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebagai pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak didorong oleh investasi riil dan ekspor, perekonomian yang bertumpu pada investasi riil akan menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan dan merata.<sup>7</sup> Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran) sehingga jumlah penduduk miskin bertambah.

Menurut BPS, selama periode 2004-2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai belum berkualitas, dilihat dari kesenjangan pertumbuhan sektoral yang cenderung semakin melebar antara sektor perdagangan, komunikasi dan jasa dengan sektor riil (industri, pertanian dan pertambangan).<sup>8</sup> Sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja tumbuh lambat dibandingkan dengan sektor perdagangan, komunikasi dan jasa.

Indikasi kurang berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat juga dari komponen pertumbuhan ekonomi menurut penggunaannya.

---

<sup>7</sup>Anonim, *Hatta: Pertumbuhan Ekonomi Bisa 8 Persen*, Oktober 2009, p.1 (<http://nasional.kompas.com/read/2009/10/23/07524413/Hatta.Pertumbuhan.Ekonomi.Bisa.8.Persen>), diakses tanggal 26 Februari 2012 pukul 18.57

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2009), p.61

Selama periode 2004 sampai dengan 2008 komponen penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 61-67 persen. Sebaliknya sumbangan komponen investasi terhadap pembentukan PDB hanya berkisar 22-28 persen.<sup>9</sup> Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Hatta Rajasa pada tahun 2009 yang menyatakan pertumbuhan lebih didorong oleh konsumsi, tecermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rata-rata mencapai 70 persen. Kontribusi investasi riil yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian terhadap PDB rata-rata hanya 20 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir hanya 4-6 persen karena lebih didorong konsumsi.<sup>10</sup> Pentingnya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi agar memiliki daya serap lebih tinggi terhadap angkatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong yang memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja dan faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran.<sup>11</sup> Arus urbanisasi yang berlebih juga menjadi pemicu terjadinya kepadatan penduduk di perkotaan. Banyaknya migran baru yang berkualitas akan terserap dalam sektor formal, sedangkan migran baru yang tidak berkualitas akan terserap dalam sektor

---

<sup>9</sup>*Ibid*, p.63

<sup>10</sup>Anonim, *Hatta: Pertumbuhan Ekonomi Bisa 8 Persen*, Oktober 2009, p.1  
(<http://nasional.kompas.com/read/2009/10/23/07524413/Hatta.Pertumbuhan.Ekonomi.Bisa.8.Persen>), diakses tanggal 26 Februari 2012 pukul 18.57

<sup>11</sup>Ari Widiastuti, *Op. Cit*, p.17

informal yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan. Inilah yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Terdapat tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat, yaitu terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup dan migrasi internasional.<sup>12</sup>

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.<sup>13</sup> Pendidikan merupakan salah satu investasi untuk meningkatkan produktivitas modal manusia (*human capital*). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga meningkat sehingga dapat terserap pada sektor formal yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang cukup akan mampu mengangkat kehidupan seseorang dari kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di propinsi DKI Jakarta.

---

<sup>12</sup>Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 285-286

<sup>13</sup>Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006), p. 434

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

### a. Tingkat Pengangguran

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?

### b. Tingkat Kemiskinan

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, pada kenyataannya masalah pengangguran dan kemiskinan memiliki aspek, dimensi, dan faktor-faktor yang luas dan kompleks. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada (1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi

terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta, (2) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta”.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dibuat maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi tentang pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan pengangguran dan kemiskinan.